



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sampang Tahun 2022 telah diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022, merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja juga kepada masyarakat Kabupaten Sampang secara tertulis.

Penyusunan LKjIP ini dapat terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik dari para Stakeholders dilingkungan Organisasi Perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang penyusunan LKjIP berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi (LAN) Nomor : 239/IX/6X8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya meningkatkan baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya kami berharap semoga LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja.

Sampang, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPRANG



Drs. AHMAD ALUYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Umum	5
B. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Sampang	7
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sampang.....	8
D. Isu Strategis.....	16
E. Cascading Dinas Perhubungan Kab. Sampang	17
F. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kab. Sampang.....	29
G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).....	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	36
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	38
BAB III AKUNTABILITS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	47
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022	52
C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi	59
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran-Saran.....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komponen AKIP Dishub Kab. Sampang Tahun 2022.....	34
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dishub Kab. Sampang Tahun 2019-2024.....	38
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dishub Kab. Sampang Tahun 2022	39
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dishub Kab.Sampang Tahun 2022.....	40
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2022	47
Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya	48
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja sd akhir periode Renstra	49
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional.....	50
Tabel 3.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes).....	50
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	51
Tabel 3.7 Efisiensi Pelayanan Perhubungan.....	52
Tabel 3.8 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2022.....	53
Tabel 3.9 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dishub Tahun 2022.....	52

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dishub Kab. Sampang	8
Bagan 1.2 Cascading Kinerja Dishub Kab. Sampang	18
Bagan 1.3 Proses Bisnis Dishub Kab. Sampang.....	30
Bagan 1.4 Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	31



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan



Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD 2019-2024 yang didukung oleh Dinas Perhubungan diantaranya :



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

“Membangun infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menyelenggarakan fungsi:

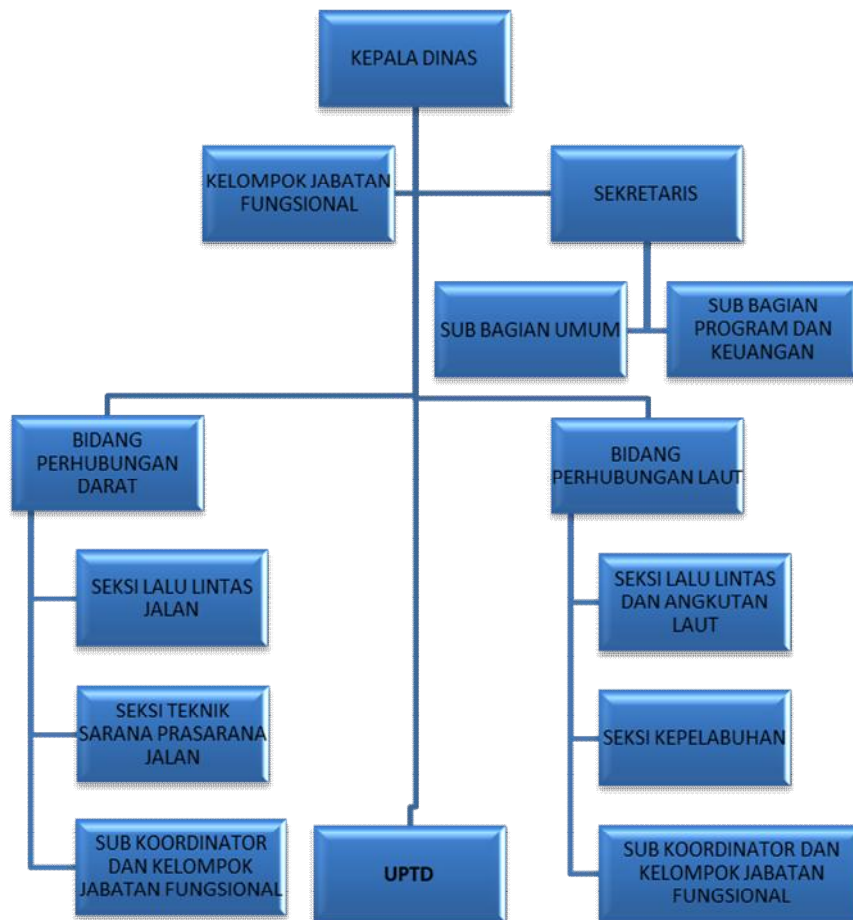
- a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Perhubungan terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas dan 2 Bidang Perhubungan yaitu Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 dengan bagan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMPANG



C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membagi secara terinci kepada Kepala Bidang yang mempunyai Fungsi dan uraian tugas masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretariat



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protokol

Sekretaris Mempunyai Fungsi :

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- 6) Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- 10) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- 11) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- 13) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



Sekretaris Membawahi :

a) Sub Bagian Umum

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b) Sub Bagian Keuangan Dan Program

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;



- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Kepala Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang lalu lintas jalan, teknik sarana prasarana jalan, juga angkutan dan keselamatan Jalan.

Bidang Perhubungan Darat Mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan darat;
- 2) Penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas;
- 3) Penyusunan petunjuk teknis bidang perhubungan darat;
- 4) Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kinerja lalu lintas jalan;
- 5) Penyusunan rencana dan program bidang teknik sarana prasarana jalan;
- 6) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dan keselamatan Jalan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perhubungan Darat Membawahi :

a). Seksi Lalu Lintas Jalan (LLAJ)

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;
- Mengumpulkan data dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

- Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
- Menyusun Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas;
- Melaksanakan kegiatan Kajian Lalu Lintas, Manajemen Rekayasa Lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- Melaksanakan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- Melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyidikan pelanggaran ketentuan Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan;
- Menyiapkan draf regulasi bidang lalu lintas dan perparkiran;
- Memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan forum lalu lintas angkutan jalan;
- Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi kinerja lalu lintas jalan;
- Melaksanakan pengolahan data dan pembinaan tempat khusus parkir;
- Melaksanakan pengadaan, pembinaan, pengelolaan lokasi, pengoperasian dan penetapan tarif parkir tepi jalan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengoperasian fasilitas tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.

b). Seksi Teknik Sarana Prasarana Jalan

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi teknik sarana prasarana jalan;
- Melaksanakan survey penentuan lokasi dan penempatan, pemeliharaan



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

dan usulan penghapusan sarana prasarana jalan;

- Menyusun dan membuat draf regulasi penentuan lokasi dan penempatan sarana prasarana jalan;
- Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sarana prasarana jalan;
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja penerangan jalan umum (PJU);
- Melaksanakan pendataan, inventarisasi pemasangan lampu penerangan jalan umum;
- Melaksanakan analisis tagihan rekening listrik penerangan jalan umum;
- Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan serta perbaikan penerangan jalan umum;
- Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang fungsi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.

4. Kepala Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan pelayaran, ijin usaha pelayaran, trayek angkutan laut dan dokumen kapal serta menyiapkan sarana bidang perhubungan laut.

Bidang Perhubungan Laut Mempunyai Fungsi :

- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan dan pelayaran;
- Pelaksanaan rencana dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan Laut;
- Pelaksanaan kebutuhan sarana perhubungan laut;



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

- Pelaksanaan pembinaan penunjang pelayaran;
- Pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha pelayaran rakyat dan angkutan laut;
- Pelaksanaan penetapan besarnya tarif angkutan laut;
- Pelaksanaan penetapan trayek Angkutan Laut dan Perintis; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Perhubungan Laut Membawahi :

a). Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan sungai dan danau perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- Menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau serta penetapan lintas penyeberangan (trayek).
- Menyiapkan bahan pemberian ijin trayek penyelenggaraan angkutan laut, sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten;
- Menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan laut, sungai dan danau;
- Melakukan operasi laut dalam rangka kelancaran lalu lintas dan angkutan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi lalu lintas bidang perhubungan laut; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut.

b). Seksi Kepelabuhan

- Menyiapkan bahan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal ;



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Dermaga Kapal;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengawasan kegiatan pengusaha, pengelolaan pelabuhan, pengelolaan dermaga dan pengawasan pelabuhan serta pelayanan retribusi pengelolaan pelabuhan;
- Menyiapkan bahan penetapan rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada perairan di wilayah pelabuhan pengumpan lokal;
- Memberikan ijin usaha bagi badan usaha pelabuhan di lingkungan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- Menyiapkan bahan penerbitan ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- Menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut

3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan UPTD Perhubungan
- b. UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- c. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- d. Memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- c. Setiap kelompok dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi sekretariat, bidang dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- d. Subkoordinator diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

D. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Hasil analisa isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Masih Tingginya Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas
- b. Masih Rendahnya Pemenuhan Standart Keselamatan Bagi Pengguna Jalan;
- c. Minimnya Perlengkapan Jalan
- d. Rendahnya Konektivitas Transportasi Bagi Masyarakat Kepulauan Dan Daerah Terpencil.



E. CASCADING DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



Cascading Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan Daerah	Indeks Layanan Perhubungan	Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalan dalam kondisi baik	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot	- Jumlah CCTV Counting yg terpenuhi; - Jumlah marka yg terpenuhi; - Jumlah PJU yg terpasang; - Jumlah rambu-rambu lalu lintas yg terpenuhi .	
									Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	unit



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	- Jumlah median jalan yg terpelihara; - Jumlah PJU yg terpelihara; - Jumlah rambu-rambu lalu lintas yg terpelihara; - Jumlah rekening listrik PJU yg terbayar; - Jumlah traffic light yg terpelihara; - Jumlah warning light yg terpelihara	
									Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	unit



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase ketersediaan pengelolaan terminal penumpang tipe c	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	- Jumlah halte yang terbangun; - Jumlah halte yang terpelihara; - Jumlah pembebasan tanah terminal yg dilaksanakan; - Jumlah pemeliharaan terminal yg terpenuhi; - Jumlah ruang tunggu terminal yg dibangun.	
									Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Orang



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Ketersediaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah parkir berlangganan yg dilaksanakan; - Jumlah pelatihan juru parkir yang dilaksanakan	
									Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	Laporan



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah operasi sadar tertib lalu lintas yg dilaksanakan; - Jumlah PAM insedentil; - Jumlah PAM lebaran yg dilaksanakan; - Jumlah pengamanan Car Free Day; - Jumlah pengamanan Natal dan tahun baru.	
									Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota*	Laporan



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah penyediaan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
									Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	unit



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

					2. Persentase angkutan darat yang laik jalan	4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketersediaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah pembangunan ruang pelayanan drive thru; - Jumlah pengadaan bahan baku operasional pelayanan.	
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*	unit



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Jumlah alat yg terpelihara; - Jumlah kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor yg dilaksanakan; - Jumlah perawatan aplikasi yg dilaksanakan.	
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*	unit



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik	1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kapal dan penumpang maupun barang dan kendaraan dapat didata diaplikasi	
									Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Dok



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kru speedboat dalam kegiatan operasional; - Jumlah kunjungan Forpimda ke Pulau Mandangin; - Jumlah pengamanan prefentif arus mudik - arus balik penumpang kapal di Pelabuhan	



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Laporan
						2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Ketersediaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Persyaratan Perizinan Pelabuhan Tanglok dan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	Dok
							Persentase Ketersediaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Jumlah lanjutan pembangunan dermaga; - Jumlah Pembangunan pengadaan los PKL Jumlah pembangunan pengadaan pagar dermaga/tambatan perahu; - Jumlah pengadaan tangga penumpang; - Jumlah pohon/penghijauan	



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

									disekitar pelabuhan	
									Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara*	unit
						3. Pembangunan dan Pnertiban izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Ketersediaan Pembangunan dan Pnertiban izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	- Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yg terpenuhi	



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Ket
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun*	unit
								2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	- Jumlah sarana dan prasarana dermaga/tambatan perahu yg dipelihara	
									Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara*	unit



F. PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

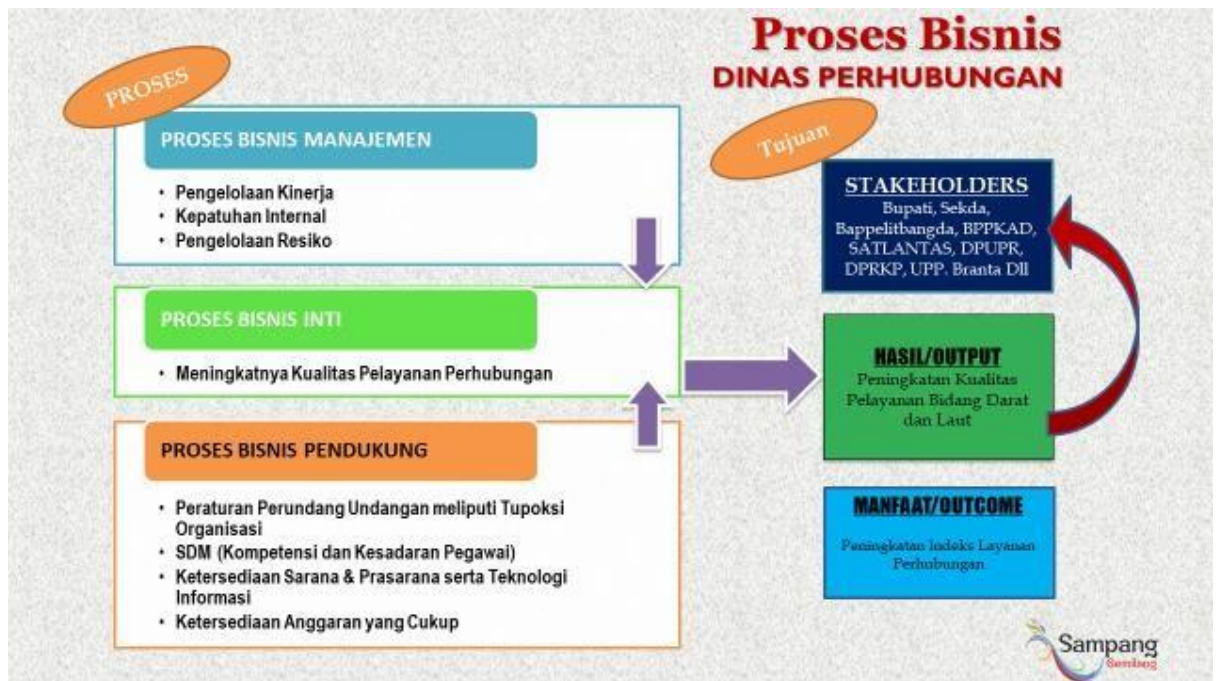
Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

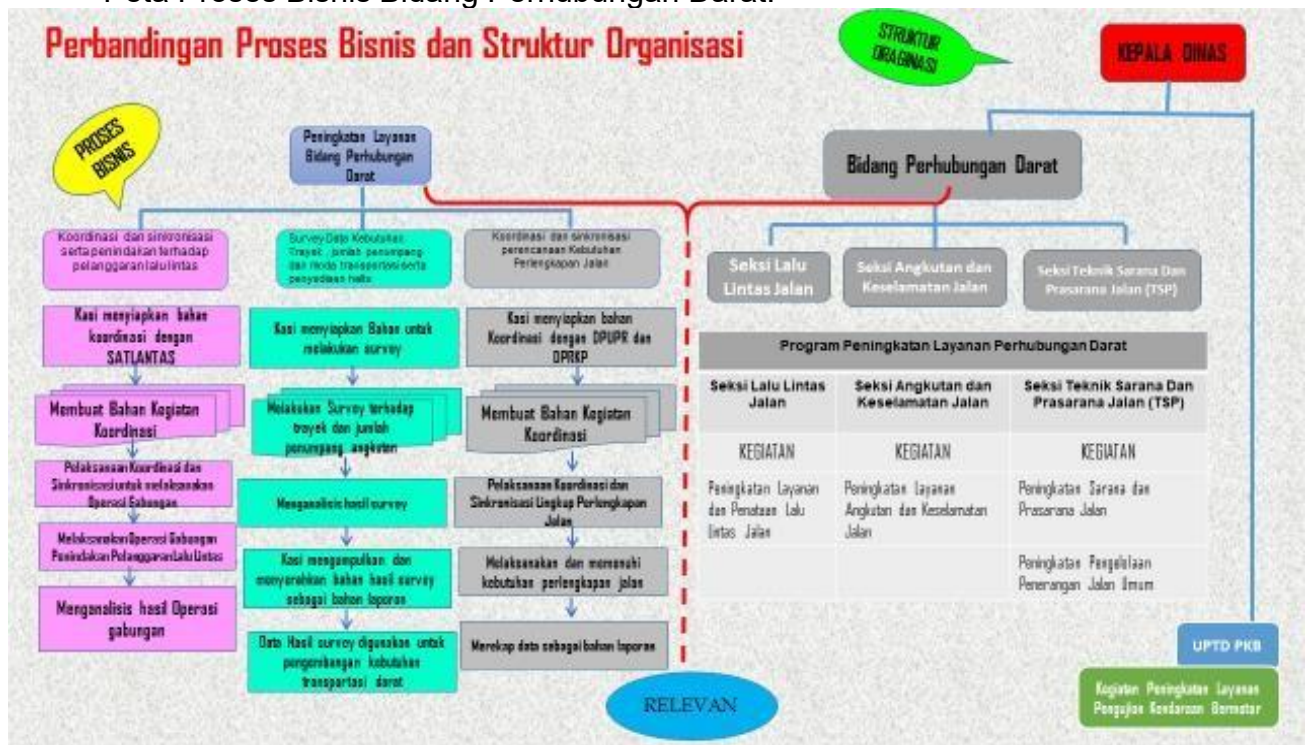


Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang :



Perbandingan Peta Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi:

Peta Proses Bisnis Bidang Perhubungan Darat:





DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Peta Proses Bisnis Bidang Perhubungan Laut:





G. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor : 065/373.34/434.100/2021 Tanggal 12 September 2022, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan dan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. *Perencanaan Kerja*

1. Dokumen renstra dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan public untuk mengakses)
2. Target jangka menengah telah dimonitor namun agar dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dengan menyusun jadwal, mekanise atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik
3. Dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja
4. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan harus menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran
5. Monitoring terhadap rencana aksi dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja

B. *Pengukuran Kinerja*

1. Data yang dikumpulkan harus didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid)
2. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi harus diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
3. Pengukuran tersebut harus menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat
4. IKU harus dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dala dokumen Rencana Kinerja Jangka



Menengah,, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja

5. Menerapkan reward dan punishment terhadap pejabat/pegawai dari hasil pengukuran kinerja

C. Pelaporan Kinerja

A. Laporan kinerja untuk di upload kedalam website

B. Laporan kinerja harus memuat informasi tentang efisiensi

C. Laporan kinerja digunakan untuk penilaian kinerja, artinya informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Melakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi secara periodic minimal triwulanan berdasarkan kriteria yang memadai untuk perbaikan pelaksanaan program

E. Pencapaian Kinerja

Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai, target kinerja yang dilaporkan dalam LKJiP untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja.

Hasil Evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022, memperoleh nilai sebesar 69,86 dengan **kategori B (Baik)** dengan kesimpulan Dinas masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.1
Komponen AKIP Dinas Perhubungan Kab. Sampang Tahun 2022

No	Komponen	Bobot	Nilai evaluasi Tahun 2021	Nilai hasil evaluasi Tahun 2022
a	Perencanaan Kinerja	30%	19,38	24,75
b	Pengukuran Kinerja	30%	20,31	17,64
c	Pelaporan Kinerja	15%	9,99	10,13
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	13,25	11,32
e	Capaian Kinerja	0%	0,00	0,00
Jumlah		100%	63,37	69,86

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran
- b. Mengaitkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penganggaran
- c. Meningkatkan komitmen pegawai dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai darii setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan



punishment

2. Pengukuran Kinerja

a) Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan bantuan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara maksimal

b) Implementasi Kinerja

- Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas harus dikaitkan dengan Penerapan reward dan punishment
- IKU direviu berkala dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- Pengukuran kinerja dan Rencana aksi harus digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
- Ada mekanisme yang memadai dan terstruktur untuk data yang dikumpulkan

3. Pelaporan Kinerja

- Penyajian informasi kinerja

Laporan kinerja kurang lengkap dalam menyajikan informasi analisis efisiensi namun perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen sebagai dasar reward dan punishment

4. Evaluasi Internal

Pemantauan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi dengan melakukan secara periodik minimal triwulanan

5. Pencapaian Sasaran

Capaian kinerja ada perkembangan untuk lebih baik dari tahun sebelumnya.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Yang mengacu **Visi Bupati Sampang** :

“Sampang Hebat Bermartabat”

Dari visi-misi di atas, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mendukung pada pencapaian **misi 3** yaitu

“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”.

dengan maksud mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan

Adapun Tujuan dari Misi 3 adalah

“Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan”

Dengan salah satu sasaran sebagai berikut

“Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah”

Selanjutnya ditetapkan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang adalah

“Meningkatnya kualitas layanan perhubungan”

Dengan indicator kinerja tujuan adalah

“Indeks layanan perhubungan”

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan perhubungan darat
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan laut

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indicator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan layanan perhubungan darat
2. Persentase peningkatan layanan perhubungan laut

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	T A R G E T					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Layanan Perhubungan			7,20	7,30	8,18	8,20	8,23	8,25
		Meningkatnya layanan perhubungan darat	Persentase peningkatan layanan perhubungan darat	4,86	3,76	6,04	3,99	3,64	3,70
		Meningkatnya layanan perhubungan laut	Persentase peningkatan layanan perhubungan laut	18,18	15,38	2,50	2,44	8,89	8,16




Sumber : Renstra Dishub Kab. Sampang 2019-2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan

indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
 Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan	Indeks Layanan Perhubungan	8,23%	
 Meningkatkan Layanan Perhubungan Darat	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Darat	3,99%	Bidang Darat
 Meningkatkan Layanan Perhubungan Laut	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	2,44%	Bidang Laut

**Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Sampang Tahun 2022 tersaji dalam Lampiran-1.**

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 22.180.841.762 yang digunakan untuk melaksanakan 39 sub kegiatan dari 15 kegiatan yang terangkum dalam 3 program sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kab. Sampang Tahun 2022

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	6.084.199.172	5.854.147.504
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.785.538.378	15.671.703.780
Program Pengelolaan Pelayaran	311.104.212	252.061.563
Jumlah	22.180.841.762	21.777.912.847

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.084.199.172,-	5.854.147.504,-	96,22
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.898.883,-	4.885.296,-	99,72
Penyusunan Dokumen Perancangan Perangkat Daerah	224.790,-	224.640,-	99,93
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	749.755,-	745.680,-	99,46
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	674.783,-	671.424,-	99,50

Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	524.885,-	522.912,-	99,62
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	524.770,-	523.120,-	99,69
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.199.900,-	2.197.520,-	99,89
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.731.892.610,-	4.540.163.412,-	95,95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.913.656,-	4.539.187.748,-	95,95
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274.012,-	272.000,-	99,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	179.942,-	179.088,-	99,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	525.000,-	524.576,-	99,92
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	729.576,-	725.296,-	99,41
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	249.838,-	248.560,-	99,49
Rekonsiliasi dan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	479.738,-	476.736,-	99,37
Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah	284.603,-	281.632,-	98,96
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	142.313,-	140.192,-	98,51
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	142.290,-	141.440,-	99,40

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.168.000,-	27.605.256,-	91,51
--	---------------------	---------------------	--------------

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.168.000,-	27.605.256,-	91,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.211.425,-	544.623.599,-	99,35
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.891,-	6.464.500,-	99,44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.025.880,-	24.830.038,-	99,22
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.001.358	59.595.340	99,32
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.892.296,-	288.236.652,-	99,77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1.800.000,-	1.560.000,-	86,67
Fasilitas Kunjungan Tamu	2.800.000,-	2.782.600,-	99,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.191.000,-	161.154.469,-	98,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,-	120.000.000,-	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,-	120.000.000,-	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.516.200,-	345.740.459,-	95,90
Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber daya Air	156.516.200,-	141.740.459,-	90,56

dan Listrik			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.000.000,-	204.000.000,-	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.497.875,-	270.122.554,-	93,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.500.000,-	194.597.382,-	92,01
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,-	10.829.300,-	98,45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.997.875,-	64.695.872,-	99,54
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.785.538.378,-	15.671.703.780,-	99,28
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.811.231.324,-	13.728.929.242,-	99,40
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.348.935.104,-	4.315.157.789,-	99,22
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9.462.296.220,-	9.413.771.453,-	99,49
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	71.582.861,-	70.096.478,-	97,92
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	71.582.861,-	70.096.478,-	97,92
Pertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.263.629.678,-	1.238.149.571,-	97,98
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1.263.629.678,-	1.238.149.571,-	97,98

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	373.888.015,-	373.148.848,-	99,37
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253.003.575,-	252.519.238,-	99,81
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.884.440,-	120.629.610,-	99,79
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	265.206.500,-	261.379.641,-	98,56
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	265.206.500,-	261.379.641,-	98,56
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	311.104.212,-	252.061.563,-	81,02
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	229.577.855,-	192.770.640,-	83,97
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan	62.765.560,-	61.215.330,-	97,53

Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.812.295,-	131.555.310,-	78,86
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	81.526.357,-	59.290.923,-	72,73
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	81.526.357,-	59.290.923,-	72,73
TOTAL	22.180.841.762,-	21.777.912.847,-	98,18



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai sampai ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi memegang peranan penting dengan melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang aman, lancar, mencerminkan keteraturan wilayah, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian wilayah. Di kabupaten Sampang pada P-RPJMD 2019-2024 perwujudan transportasi yang baik diarahkan dalam meningkatkan iklim investasi yang sehat dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah melalui pembangunan sarana prasarana transportasi.

LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagai fungsi aktualitas dari proses perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat

pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran dan juga cara membandingkan antara realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

A. Realisasi Indikator Tujuan RPJMD tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2022

Tujuan Renstra			Realisasi	Tahun 2022		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks layanan perhubungan	%	8,18	8,20	8,20	100

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Tujuan Renstra

Dari tabel capaian sasaran di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam peningkatan kualitas infrastruktur daerah dengan indikator Indeks Layanan Perhubungan tercapai 8,20% dari target 8,20 atau 100%, dengan layanan perhubungan ini masyarakat puas dikarenakan banyak sarana dan prasarana yang sudah dipenuhi dalam hal pemenuhan Lampu

Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta perlengkapan jalan/alat keselamatan jalan seperti rambu-rambu dll.

Capaian kinerja beserta analisis Dishub Kabupaten Sampang Tahun 2022 disajikan sebagai

berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan perhubungan ;
IK. Tujuan : Indeks layanan perhubungan

B. Realisasi Indikator Kinerja Renstra tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (4 tahun sebelumnya 2018-2021), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
		2022	2018	2019	2020	2021	2022
1. Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	1. persentase peningkatan layanan perhubungan darat	3,99	2,65	3,45	0,66	6,97	4,66
2. Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	2 persentase peningkatan layanan perhubungan laut	2,44	22,22	12,90	0,00	2,5	2,44

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada indikator persentase peningkatan layanan perhubungan darat mencapai target dimana indikator ini diperoleh dari pemenuhan perlengkapan jalan terdiri dari Penerangan Jalan Umum (PJU) terpasang 482 titik dan rambu-rambu lalu lintas terpasang 63 unit serta pemeliharaan PJU 370 panel, jumlah meterisasi

yang dilaksanakan 42 paket, .

2. Pada indikator Persentase peningkatan layanan perhubungan laut mencapai target untuk sub kegiatan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian terealisasi 78,86% untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/kota disebabkan ada masalah atau kerusakan pada mesin kapal sehingga bahan bakar tidak terealisasi 100% sedangkan untuk sub kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal dengan capaian realisasi 72,73% karena adanya aturan yang tidak memperbolehkan pencairan uang lembur di tahun 2022.

Realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi kinerja sd Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun 2024	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	1. persentase peningkatan layanan perhubungan darat	3,70	4,66	125,95
2. Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	2 persentase peningkatan layanan perhubungan laut	8,16	2,44	29,90

Dari tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan untuk kemajuan dari akhir Renstra Dishub Kab. Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika Realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level Nasional (Benchmark Kinerja), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Keterangan
1. Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	1. persentase peningkatan layanan perhubungan darat	4,66	-	Tidak Tersedia Data
2. Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	2 persentase peningkatan layanan perhubungan laut	2,44	-	Tidak Tersedia Data

Perbandingan realisasi kinerja Dishub dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah NIHIL karena tidak tersedia kinerja Nasional

Tabel 3.5
Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per Outcomes)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	% Anggaran
1. Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	1. persentase peningkatan layanan perhubungan darat	15.785.538.378	99,28
2. Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	2 persentase peningkatan layanan perhubungan laut	311.104.212	81,02

Dapat dijelaskan dari tabel di atas untuk persentase capaian anggaran dihitung melalui anggaran pada masing-masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah adalah Rp 22.180.841.762 (termasuk program adum/anggaran sekretariat). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau cost per outcome dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja dimana dengan anggaran hampir 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	1. persentase peningkatan layanan perhubungan darat	3,99	4,66	116,79	15.785.538.378	15.671.703.780	99,28
2. Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	2 persentase peningkatan layanan perhubungan laut	2,44	2,44	100	311.104.212	252.061.503	81,02

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tersebut, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya

anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Efisiensi Pelayanan Perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	% penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	1. persentase peningkatan layanan perhubungan darat	116,79	99,28	14,99
2. Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	2 persentase peningkatan layanan perhubungan laut	100	81,02	18,98

Berdasarkan tabel 3.7 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Dishub kab. Sampang Tahun 2022 dalam kategori berhasil pada masing-masing sasaran telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, tingkat efisiensi sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100% sehingga dapat dikatakan program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang hampir mencapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Penganggaran program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022 dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan anggaran dan realisasi belanja Dinas Perhubungan Kab. Sampang tahun 2022 sebagai berikut:

1

Tabel 3.8
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2022

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2022									
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG									
No	URAIAN	Alokasi Biaya							
		Anggaran	Realisasi	%					
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.558.780.000	3.311.721.300	93,06					
	1. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	3.042.130.000	2.789.999.000	91,71					
	2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	350.000.000	378.015.000	108					
	3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	28.000.000	27.200.000	97,14					
	4. Retribusi Pelayan Tempat Khusus Parkir	8.000.000	8.400.000	105,00					
	5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	120.000.000	94.302.500	78,59					
	6. Retribusi Izin Trayek	650.000	50.000	7,69					
	7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: - Pendapatan Denda Retribusi PKB	10.000.000	12.909.600	129,10					
No	URAIAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran				
		Anggaran	Realisasi	%	Uraian	Target	Realisasi	%	
B	BELANJA LANGSUNG (BL)	22.180.841.762	21.777.912.847	98,18%					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.084.199.172	5.854.147.504	96,22%	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100	%	100	100%

	DAERAH KAB./KOTA								
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.898.883	4.885.296	99,72%	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100	%	100	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	224.790	224.640	99,93%	Penyusunan Renja dan perubahan Renja Dishub Kab. Sampang yg disusun	2	dok	2	100%
					Penyusunan Renstra Dishub Kab. Sampang yg disusun	1	dok	1	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	749.755	745.680	99,46%	Jumlah dokumen RKA yg disusun	1	dok	1	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	674.783	671.424	99,50%	Jumlah penyusunan perubahan RKA yg disusun	1	dok	1	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	524.885	522.912	99,62%	Jumlah dokumen DPA yg disusun	1	dok	1	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	524.770	523.120	99,69%	Jumlah penyusunan perubahan DPA yg disusun	1	dok	1	100%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.199.900	2.197.520	99,89%	Jumlah penyusunan LPPD, LKPj, LKjIP, SAKIP yg disusun	5	dok	5	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.731.892.610	4.540.163.412	95,95%	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	%	100	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.913.656	4.539.187.748	95,95%	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	55	pegawai	51	100%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	274.012	272.000	99,27%	Jumlah penyediaan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12	bulan	12	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	179.942	179.088	99,53%	Jumlah penyusunan laporan akhir tahun yg disusun	1	laporan	1	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	525.000	524.576	99,92%	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan yg disusun	12	laporan	12	100%
					Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran yg disusun	2	laporan	2	100%
					Jumlah penyusunan laporan keuangan triwulanan yg disusun	4	laporan	4	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	729.576	725.296	99,41%	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100	%	100	100%

1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	249.838	248.560	99,49%	Jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang	2	laporan	2	100%
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	479.738	476.736	99,37%	Jumlah laporan barang milik daerah	2	laporan	2	100%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	284.603	281.632	98,96%	Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah	100	%	100	100%
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	142.313	140.192	98,51%	Jumlah perencanaan pengelolaan retribusi daerah	12	laporan	12	100%
2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	142.290	141.440	99,40%	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1	laporan	1	100%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.168.000	27.605.256	91,51%	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	100	%	80%	80%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.168.000	27.605.256	91,51%	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	5	OK	4	80%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.211.425	544.623.599	99,35%	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.891	6.464.500	99,44%	Jumlah komponen instalasi listrik	162	buah	215	132%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.025.880	24.830.038	99,14%	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	4	jenis	4	100%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.892.296	288.236.652	98,72%	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7	jenis	18	257%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.560.000	86,67%	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	exempl ar	12	100%
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.800.000	2.782.600	99,38%	Penyediaan makanan dan minuman tamu	90	hari	225	250%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.191.000	161.154.469	98,75%	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	96	OK	945	10,15%
					Jumlah rapat Perjalanan Dinas Biasa	96	OK	162	59,26%
					Jumlah Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kota	96	OK	52	54,17%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	120.000.000	100%	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	120.000.000	100%	Jumlah pengadaan sewa kendaraan dinas roda 4	1	unit	1	100%

8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.516.200	345.740.459	95,90%	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	%	100	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.516.200	141.740.459	90,56%	Jumlah pembayaran listrik, air dan komunikasi	12	bulan	12	100%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.000.000	204.000.000	100,00%	Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan, satpam, penjaga malam	12	bulan	12	100%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.497.875	270.122.554	93,96%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100	%	100	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.500.000	194.597.382	92,01%	Jumlah kendaraan dinas operasional yg dipelihara	11	unit	43	390%
					Jumlah perizinan kendaraan dinas operasional	42	unit	38	90%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	10.829.300	98,45%	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	59	unit	55	93%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.997.875	64.695.872	99,54%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	unit	4	100%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.785.538.378	15.671.703.780	99,28%	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam kondisi baik	98,98	%	99,4	100,4%
					Persentase angkutan darat yg laik jalan	91,69	%	98,40	107,3%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.811.231.324	13.728.929.242	99,28%	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	100	%	100	100%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.348.935.104	4.315.157.789	99,22%	Jumlah median jalan yg terpasang	2	paket	0	0%
					Jumlah PJU yg terpasang	370	PJU	140	100%

					Jumlah rambu-rambu lalu lintas yg terpenuhi	24	unit	63	100%
					Jumlah marka yg terpenuhi	949	unit	910	100%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9.462.296.220	9.413.771.453	99,49%	Jumlah PJU yg terpelihara	370	panel	174	100%
					Jumlah rambu-rambu lalu lintas yg terpelihara	46	paket	42	100%
					Jumlah rekening listrik PJU yg terbayar	12	bulan	12	100%
					Jumlah traffic light yg terpelihara	6	unit	14	100%
					Jumlah warning light yg terpelihara	10	unit	3	100%
					Jumlah meterisasi yang dilaksanakan	1	paket	1	100%
					Jumlah median jalan yang terpelihara	40	paket	42	100%
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	71.582.861	70.096.478	97,92%	Persentase ketersediaan pengelolaan terminal penumpang tipe C	100	%	100	100%
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	71.582.861	70.096.478	97,92%	Jumlah halte yg terpelihara	12	lap	12	100%
					Jumlah Pemasangan Pagar Pengaman Halte	3	paket	3	100%
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.263.629.678	1.238.149.571	97,98%	Persentase Ketersediaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir	100	%	100	100%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.263.629.678	1.238.149.571	97,98%	Jumlah parkir berlangganan yg dilaksanakan	12	bulan	12	100%
					Jumlah Sosialisasi Juru Parkir Berlangganan yang dilaksanakan	3	kali	5	100%
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	373.888.0115	373.148.848	99,80%	Persentase Ketersediaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	%	100	100%
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253.003.575	252.519.238	99,81%	Jumlah pengadaan bahan baku operasional pelayanan	12	bulan	12	100%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.884.440	120.629.610	99,79%	Jumlah alat yg terpelihara	12	alat	12	100%
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	265.206.500	261.379.641	98,56%	Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	%	100	100%
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	265.206.500	261.379.641	98,56%	Jumlah dokumen manajemen rekayasa lalu lintas yg disusun	1	dok	1	100%
					Jumlah PAM insedentil	50	kali	2	107%
					Jumlah PAM lebar yang dilaksanakan	16	hari	16	100%

					Jumlah pengamanan Natal dan tahun baru	8	hari	10	100%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	311.104.212	252.061.563	81,02%	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik	57,14	%	57,14	100%
1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	229.577.855	192.770.640	30,59%	Persentase Ketersediaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota	100	%	100	100%
1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota	62.765.560	61.215.330	97,53%	Jumlah kapal dan penumpang maupun barang dapat didata	12	lap	12	100%
2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.812.295	131.555.310	78,86%	Jumlah kapal yang dipelihara	12	mesin	12	100%
					Jumlah kunjungan kerja pejabat	4	kali	2	100%
					Jumlah pengamanan prefentif arus mudik - arus balik penumpang kapal di Pelabuhan	4	hari	4	100%
2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	81.526.357	59.290.923	72,73%	Persentase Ketersediaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100	%	100	100%
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	81.526.357	59.290.923	72,73%	Jumlah Portal yang dipelihara	2	unit	2	100%
JUMLAH (BTL+BL)		22.180.841.762	21.777.912.847	98,18%					

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan TA 2022

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		TINDAK LANJUT
A	Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen rensta dapat diakses dengan mudah setiap saat	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya peningkatan kembali dengan

2.	<p>(misalnya melalui website resmi Pemerintah Kabupaten atau media lain yang memudahkan public untuk mengakses)</p>	<p>mempertimbangkan reward dan punishment</p> <p>Berupa Reward (Penghargaan ASN Dishub, Punishment : Potongan TPP)</p>
3.	<p>Target jangka menengah telah dimonitor namun agar dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dengan menyusun jadwal, mekanise atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik</p> <p>Dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja</p> <p>1. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan harus menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran</p> <p>2. Monitoring terhadap rencana aksi dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja</p>	<p>• Ada mekanisme yang memadai dan terstruktur untuk data yang dikumpulkan</p>

B	Pengukuran Kinerja	
	<p>1. Data yang dikumpulkan harus didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid)</p> <p>2. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi harus diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)</p> <p>3. Pengukuran tersebut harus menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat</p> <p>4. IKU harus dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah,, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja</p> <p>5. Menerapkan reward dan punishment terhadap</p>	<p>a) Kualitas Pengukuran Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan bantuan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara maksimal</p> <p>b) Implementasi Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan reward berupa penghargaan ASN Dishub dan punishment berupa potongan TPP • Melakukan reviu IKU berkala pada P-Renstra Dishub Kab. Sampang Tahun 2019-2024 • Telah dilakukan Pengukuran kinerja atas Rencana aksi yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

	pejabat/pegawai dari hasil pengukuran kinerja	
C	Pelaporan Kinerja	
1	Laporan kinerja untuk di upload kedalam website	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian informasi kinerja Laporan kinerja telah menyajikan informasi analisis efisiensi dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai
2	Laporan kinerja harus memuat informasi tentang efisiensi	
3	Laporan kinerja digunakan untuk penilaian kinerja, artinya informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment	
D	Evaluasi Internal	
	Melakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi secara periodic minimal triwulanan berdasarkan kriteria yang memadai untuk perbaikan pelaksanaan program	Pemantauan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi dengan melakukan secara berkala dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode
E	Pencapaian Kinerja	

	<p>Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai, target kinerja yang dilaporkan dalam LKJIP untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja.</p>	<p>Capaian kinerja telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.</p>
--	--	--



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022 disusun sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang.

B. SARAN – SARAN

1. Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna yang lebih maksimal
2. Kerjasama maupun kemitraan dengan berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program dinas.



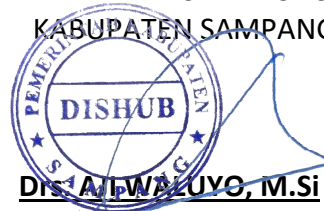
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

3. Capaian kinerja Dishub Kabupaten Sampang pada Tahun 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik, di tengah pandemic COVID-19 yang sedang terjadi.
4. Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara untuk target kinerja yang belum atau tidak tercapai perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak
5. Hambatan dan kendala yang ditemui sebagai evaluasi yang dilakukan untuk dijadikan sebagai focus perbaikan kinerja ke depan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Perhubungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Sampang, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG



DIS. Aji Waluyo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198303 1 006



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. AJI WALUYO, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang
NIP : 19630401 198303 1 006

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SLAMET JUNAIDI**
Jabatan : Bupati Sampang

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SLAMET JUNAIDI

Sampang, 9 Januari 2023
Pihak Pertama,

Drs. AJI WALUYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198303 1 006



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	Indeks Layanan Perhubungan	8,23 %
1	Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Darat	3,64 %
2	Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	8,89 %

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.632.908.564	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.394.553.786	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 400.254.772	APBD
JUMLAH ANGGARAN		18.427.717.122	

Sampang, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. AJI WALUYO, M.Si
Perbisa Utama Muda
NIP. 19630401 198303 1 006

